



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KECAMATAN WATANG SIDENRENG**

**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKJ-IP)**

**TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Watang Sidenreng selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama /kedua /ketiga /keempat /kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj-IP Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Watang Sidenreng. Komitmen dalam penyusunan LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Watang Sidenreng untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Watang Sidenreng Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Watang Sidenreng pada tahun 2022, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Empangae, 15 Januari 2023

**CAMAT WATANG SIDENRENG**



**H.ARNOL BARAMULI.ST,M.Adp.KP**

NIP. '197302082008021001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kecamatan Watang Sidenreng melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kecamatan Watang Sidenreng untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kecamatan Watang Sidenreng untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Watang Sidenreng. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Watang Sidenreng ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Watang Sidenreng di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
<b>BAB I : Pendahuluan</b>	<b>5</b>
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Gambaran Umum Organisasi	5
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.5. Komposisi SDM Organisasi	9
1.6. Isu Strategi	14
1.7. Landasan Huum	16
<b>BAB II : Perencanaan Kinerja</b>	<b>18</b>
2.1 Rencana Strategis Kantor Camat Watang Sidenreng	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
2.3 Indikator Kinerja Utama	21
<b>BAB III : Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>22</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2. Realisasi Anggaran	38
<b>BAB IV. : P E N U T U P</b>	<b>42</b>
4.1. Simpulan Umum atas capaian Kinerja	42
4.2. Langkah Langkah Peningkatan Kinerja	42
Lanpiran	44

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan Mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi



salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

### **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kecamatan Watang Sidenreng merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar 74, 96 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Watang Sidenreng membawahi 5 desa dan 3 Kelurahan yaitu Desa Mojong, Talumae, Damai, Talawe, Aka-Akae, Kelurahan Empagae, Kelurahan Sidenreng, dan Kelurahan Kanyuara dan secara geografis terletak di bagian Ibu ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 11 Km<sup>2</sup>. Penduduk Kecamatan Watang Sidenreng, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Panca Rijang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pitu Riawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tellu limpoE
- Sebelah Barat : Kabupaten MaritengaE

### **1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### ***Tugas***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
  1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
  5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Fungsi**

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan;

Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 18 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :





# STURKTUR ORGANISASI KECAMATAN WATANG SIDENRENG



**C A M A T**  
ARNOL BARAMULI,ST,M.Adm KP



**SEKRETARIS**  
Ir.H.HAMIDA M.Pd

**Kelompok Jabatan Fungsional**

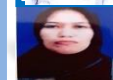
UPT PSDA : SUKRI, SE  
 UPT KB : Hj. RUSIANA, S.Sos  
 UPT Bapenda : H. MAKMUR ALI  
 B P P : ANDI ODDANG, S.ST  
 PUSKESMAS : NURDIN LATONG, S.K.M



**Kasubag. Keu & Perencanaan**  
MUH.HUSNI, S.IP



**Kasubag. Umum & Kepeg.**  
NURDIN S.IP



NELLY



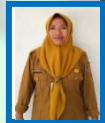
AMMAR



**Kasi. Pemerintahan**  
MUH. NASIR RAHIM, S.Sos



**Kasi. Ekobang**  
MUSTARI, S.Pd



**Kasi. Kesra**  
KAMARIA S.SOS



**Kasi. Trantib**  
H. SARDI, S.Kom, M.Si



**Kasi. Pelayanan Umum**  
A.ASMA, S.Sos

**Kel. Empagae**

**Kel. Sidenreng**

**Kel. Kanyuara**

**Desa Mojong**

**Desa Talumae**

**Desa AkaAkae**

**Desa Damai**

**Desa Talawe**



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng terdiri atas :

### **Kantor Kecamatan**

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- **Kantor Kelurahan Empagae**
- **Kantor Kelurahan Kanyuara**
- **Kantor Kelurahan Sidenreng**

### **1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Watang Sidenreng adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki komposisi

Sumber Daya Manusia sebagai berikut

### **Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng (Termasuk Kelurahan) terdiri dari 14 (Empat Belas) orang Laki-laki dan 11 (Sebelas) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Gender  
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng  
Tahun 2023



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh 9 orang tenaga Non ASN.

### **Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan**

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan



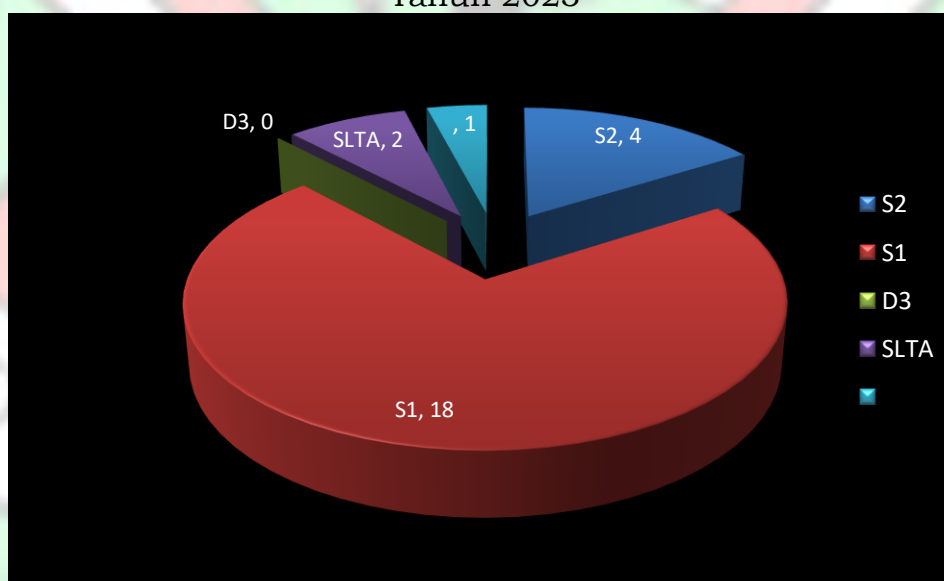
bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Watang Sidenreng dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan  
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng  
Tahun 2023**

NO	TINGKAT	JUMLAH	L	P
1	S2	4	2	2
2	S1	18	10	8
3	D3	0	0	0
4	SLTA	2	1	1
5	SMP	1	1	0
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan  
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng  
Tahun 2023**



Sedangkan Komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan dan terpilah menurut Jenis Kelamin digambarkan dalam gambar diatas

### **Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 23 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV serta 2 Orang Non Esalon. Adapun ASN. menurut jenjang eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon  
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng  
Tahun 2023

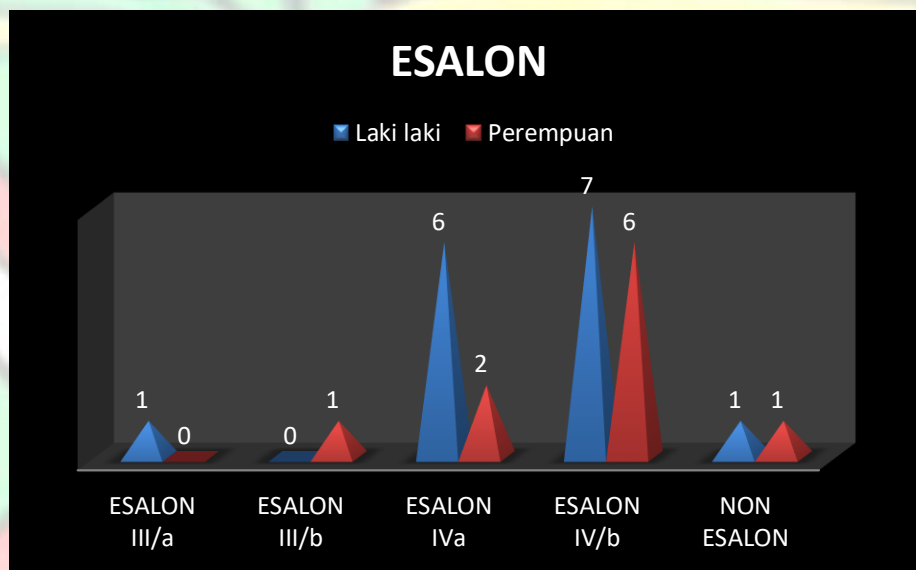
NO	NAMA	JABATAN	JENIS KEL.	ESALON
1	ARNOL BARAMULI, ST, M.Adm.KP	Camat Watang Sidenreng	L	III a
2	Ir. HAMIDAH YUSUF, M.Pd	Sekretaris Camat	P	III b
3	MUH. NASIR RAHIM, S.Sos	Kasi. Pemerintahan	L	IV a
4	A. ASMA, S.Sos	Kasi. Pelayanan Umum	P	IV a
5	H. SARDI, S.Kom, M.Si	Kasi.Ketentraman dan Ketertiban	L	IV a
6	MUSTARI, S.Pd	Kasi.Ekonomi dan Pembangunan	L	IV a
7	KAMARIAH S.Sos	Kasi. Kesejahteraan Rakyat	P	IV a
8	MUH. HUSNI, S.IP	Kasubag.Perencanaan dan Keuangan	L	IV b
9	NURDIN. N S,IP.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	L	IV b
10	N E L L Y	Pengelola Gaji	P	NON
11	AMMAR	Bendahara Pengeluaran	L	NON
12	ALAMSYAH, SE	Lurah Sidenreng	L	IV a
13	I CANNI, S.Sos	Sekretaris Lurah Sidenreng	P	IV b
14	NURLINDA TAPPU,SH	Kasi. Pemerintahan Kel.Sidenreng	P	IV b
15	ABDUL KADIR, S.Pd	Kasi Trantib dan Linmas Kel.Sidenreng	L	IV b
16	NAMRE W, S.Sos	Kasi.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sidenreng	P	IV b
17	LARANRU AKKAS, S.Sos.	Lurah Kanyuara	L	IV a



18	Hj. SYAMSURIANA, S.Sos	Sekretaris Lurah Kanyuara	P	IV b
19	SENRYA,S.Sos, M.Si	Kasi.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kel.Kanyuara	P	IV b
20	ZAINAL ABIDIN, S.Sos	Kasi.Pemerintahan Kel.Kanyuara	L	IV b
21	Hj. NURHAYATI, S.Sos	Lurah Empagae	P	IV a
22	H. MUSBAHUDDIN	Sekretaris Lurah Empagae	L	IV b
23	HASDIAH LABABA, S.IP	Kasi.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kel.Empagae	P	IV b
24	HAEDIR,S.AP	Kasi. Pemerintahan Kel.Empagae	L	IV b
25	ARTHIT GUNAWAN, SE	Kasi. Trantib dan Linmas Kel.Empagae	L	IV b

Berikut digambarkan Komposisi ASN menurut Jenjang Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut

#### Komposisi Jenis Kelamin menurut Jenjang Eselon dan dan Non Eselon



#### **Komposisi ASN Menurut Golongan**

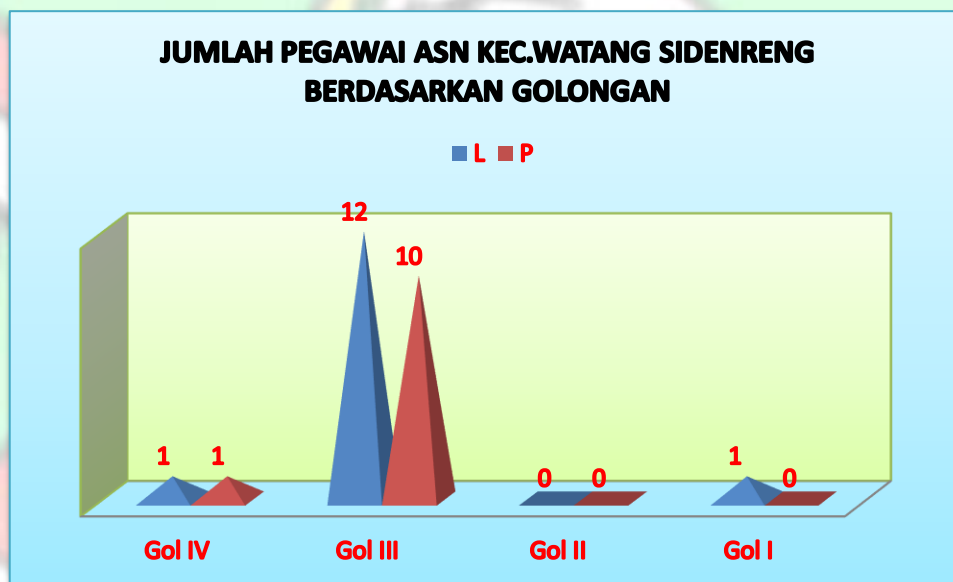
Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng menurut golongan Tahun 2023. ASN di Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Orang Dimana golongan IV sebanyak 2 (Dua) orang, Golongan III sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Orang dan Golongan II sebanyak 0 (Nol) Orang dan Golongan 1(satu) Org. ASN Kecamatan Watang Sidenreng Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan  
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng  
Tahun 2023

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Gol IV	1	1	2
2	Gol III	12	10	22
3	Gol II	0	0	0
4	Gol I	1	0	1
<b>JJMLAH</b>		<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi ASN Kantor Kecamatan Watang Sidenreng per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan  
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng  
Tahun 2023



### 1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunandaerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan



pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Watang Sidenreng dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih

- dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
  - d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
  - e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2023 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

### **1.7 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng



Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng**

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Watang Sidenreng mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 14 Desember 2021, 061/067/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### **Visi**

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :



**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**

**Misi**

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Watang Sidenreng berada pada misi 5 yaitu “ **Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance**” sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Visi		<b>Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera</b>					
Misi 5		<b>Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</b>					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>		Indeks Kepuasan masyarakat	74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	0	72 %	73 %	74 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	32,54 (C)	35,54 (C)	40,88 (C)	48,70 (C)	52,25 (CC)

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watang Sidenreng untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan
- c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan

2. Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

**2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja tahun 2023 sebagai berikut

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	2023
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>		Indeks Kepuasan masyarakat	80.8
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan	100 %



	kecamatan	dengan baik	
	Meningkatnya kualitas layanan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	74 %
	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	52,25 ( CC )

### 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Watang Sidenreng :

No.	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100	100 %	100 %
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	0	0	72 %	73 %	74 %
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100 %	100 %	100 %
5.	Predikat nilai sakip.	32,54 ( C )	35,54 ( C )	40,88 ( C )	48,70 ( C )	52,25 ( CC )

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik



Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri  
Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Watang Sidenreng sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

**3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.**

**Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,8	81,03	101

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 81,03 dari target sebesar 80,8 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101 % atau mencapai melebihi target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

#### Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	80,8	81,03	0,23

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Watang Sidenreng diuraikan sebagai berikut :

#### Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	Kecamatan Watang Sidenreng	3,24	3,39	0,15	81,03	B	BAIK

#### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum



yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran 1</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran 2</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	74	86	116

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 86 % dari target sebesar 74 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 116 % atau melebihi target.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2021 “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran 3</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Capaian kinerja dari indikator “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target.

#### **Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2020 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran 4</b>				
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
1.	Predikat Nilai SAKIP	48,7 (C)	51,60 (CC)	106 %

Capaian kinerja dari indikator predikat nilai sakip untuk tahun 2023 belum kami ketahui hasilnya. Hal ini dikarenakan predikat tersebut baru kami ketahui setelah pihak dari Inspektorat melakukan reviu atas laporan akhir tahun dari pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng

#### **3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan tahun lalu sebagai berikut :



Tujuan			
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2020	2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76 ( C )	81,3 (B)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Watang Sidenreng mengalami peningkatan terkait kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Pada tahun 2020 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 76 % dan tahun ini meningkat 81,3 %.

Berikut ini kami gambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun ini dengan tahun lalu.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat 2020 dengan 2021

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	2020	3,08	3,00	0,08	77,14	C	Kurang Baik
2.	2021	3,24	3,39	0,15	81,03	B	BAIK

### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1			
Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022 (%)	2023
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2022 sebesar 100 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng. Untuk mencapai indicator sasaran tersebut pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.**

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembagunan dan pemerintahan.

<b>Sasaran 2</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi</b>			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022 (%)	2023 (%)
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	80,8	86

Realisasi capaian untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan di tahun 2023 sebesar 80,8 % dan di tahun. 2023 sebesar 86 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2023 sebesar 86%, hal ini dikarenakan didalam renstra induk Kecamatan Watang Sidenreng sasaran untuk indikator tersebut belum tercover atau hanya tersirat saja, barulah di renstra perubahan dimasukkan sebagai indikator yang harus dicapai untuk mencapai visi misi bupati terpilih.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:



<b>Sasaran 3</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan</b>			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022	2023
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tidak dapat kami perbandingkan, sasaran tersebut baru dimunculkan di renstra Perubahan. Sama halnya dengan indikator sasaran 2, kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa telah dilaksanakan setiap tahunnya.

#### **Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Sasaran 4</b>			
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan</b>			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021 (%)	2022 (%)
1.	Predikat Nilai SAKIP	41,77	51,60

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2021 dengan capaian 41,77 % meningkat menjadi 51,60 %.

#### **3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan

daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD dan RENSTRA :

<b>Tujuan</b>				
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>
		<b>RPJMD</b>	<b>Renstra</b>	<b>2021</b>
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,14 (B)	76 (B)	81,03 (B)

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dengan target jangka menengah dengan nilai 80,14 dan target Renstra dengan nilai 76. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2021 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng telah melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng dengan nilai 81,03. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 76 maka realisasi tahun 2023 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Sasaran 1</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>
		<b>RPJMD (%)</b>	<b>Renstra (%)</b>	<b>2023 (%)</b>
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan



urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng untuk indicator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng dengan nilai 81,03 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2023, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{3 \text{ urusan}} \times 100 \%$$

## Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indicator sarasannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2023 (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	72	73	86

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 72 % dan target Renstra dengan nilai 73 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng hanya sebesar 86%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 72 %, maka realisasi tahun 2023 juga tidak mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan} = \frac{2 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah adalah terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2023 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 90 % dan tudang sipulung adalah 81,5 dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebesar 86,2 % dan melebihi target yang ditentukan.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:



<b>Sasaran 3</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>
		<b>RPJMD (%)</b>	<b>Renstra (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} &= \frac{\text{Jumlah Desa/ Kel yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa/Kel}} \times 100 \% \\ \text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} &= \frac{5 \text{ Desa/3 Kel}}{5 \text{ Desa/3 Kel}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Adapun jumlah desa di Kecamatan Watang Sidenreng adalah 5 desa dan 3 Kelurahan yaitu desa Mojong, Talumae, Damai, Aka-Akae, Talawe Kelurahan Kanyuara, Kelurahan Empagae dan Kelurahan Sidenreng

#### **Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2023 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2023 baru akan reuiu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reuiu. Berikut ini kami

perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2022 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

<b>Sasaran 4</b>				
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>
		<b>RPJMD (%)</b>	<b>Renstra (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1.	Predikat nilai SAKIP	B	C	CC

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2022 adalah 51,60 ( CC ) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2023 belum ada karena baru akan direviu di tahun 2024

### **3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor Kecamatan Watang Sidenreng yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2022 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari Kecamatan Watang Sidenreng.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaiki Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng yang masih kurang memuaskan atau



kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

### **3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp. Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
1.	DPA Awal tahun 2023	3.362.922.000
2.	DPPA Perubahan Pertama	3.362.922.000
3.	DPPA Perubahan Kedua	2.886.165.000

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program Program sebesar 2.886.165.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.554.252,63 atau 88%.

Anggaran tahun 2023 dialokasikan sepenuhnya untuk

menopang sasaran ke 4 tujuan dan sasaran kecamatan Watang Sidenreng :

1.	Tujuan		Indeks Kepuasan Masyarakat	
2.	Sasaran 1	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan baik
3.	Sasaran 2	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan
4.	Sasaran 3	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Jumlah Desa yang dibina
5.	Sasaran 4	:	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip

### **3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di



atas adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Dijabarkan dalam 4 sebagai berikut :
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu :
    1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    1. Pengadaan Mebel.
    2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya
    3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
    4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 2.886.165.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.757.834.200,-, Belanja barang dan Jasa Rp. 932.989.200,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 128.330.800,- sebesar 88 % sesuai tabel di bawah ini :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.757.834.200,-</b>	<b>2.490.198.363,-</b>
	Belanja Pegawai	1.824.845.000,-	1.790.700.228,-
	Belanja Barang Jasa	932.989.200,-	699.498.135,-
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>128 330 800,-</b>	<b>63.449.600,-</b>
	Total Anggaran Setelah Perubahan	<b>2.886.165.000,-</b>	<b>2.553.647.963,-</b>

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintah Kecamatan, sasaran Meningkatnya Kualitas Urusan Koordinasi dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk tahun 2023 belum dianggarkan di DPA/DPPA karena anggaran yang tidak mencukupi. Namun kegiatan yang mendukung ketiga sasaran tersebut diakomodir melalui anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusun direnstra perubahan sebagai salah satu sasaran yang harus tersurat melalui dokumen perencanaan untuk mengakomodir kegiatan para Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini dijabarkan realisasi target kinerja dan realisasi anggaran untuk tahun 2023 secara rinci dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini :



**Pencapaian Kinerja Dan Anggaran  
Per Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

NO	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN RP		
		TARGET	REALISASI	REALISASI %	TARGET	REALISASI	REALISASI %
	<b>KECAMATAN WATANG SIDENRENG</b>	<b>100%</b>		<b>90,92 %</b>	<b>2.886.165.000</b>	<b>2.253.647.963</b>	<b>88,50</b>
1	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				51.390.100	38.250.000	<b>74</b>
1.1	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100		83,33	51.390.100	38.250.000	<b>74</b>
1.1.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	3	2	67	1.390.100	0	<b>0</b>
1.1.2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	100	50.000.000	38.250.000	<b>77</b>
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				409.200.200	287.136.600	<b>70</b>
2.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100		100,00	3.790.100	2.700.000	<b>71</b>
2.1.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	100	2.700.000	2.700.000	<b>100</b>
2.1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	100	1.090.100	0	<b>0</b>
2.2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	<b>80</b>		<b>66,67</b>	<b>405.410.100</b>	<b>284.436.600</b>	<b>70</b>
2.2.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6	6	100	180.900.000	180.876.600	<b>100</b>
2.2.2	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	15	15	100	223.320.000	103.560.000	<b>46</b>

2.2.3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	0	0	1.190.100	0	0
3	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa				2.180.200	0	0
3.1	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100		50,00	2.180.200	0	0
3.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	5	100	1.090.100	0	0
3.1.2	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	5	0	0	1.090.100	0	0
4	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.423.394.500	2.228.261.363	92
4.1	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		100%	1.824.845.000	1.790.700.228	98
4.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	350	350	100	1.824.845.000	1.790.700.228	98
4.2	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		97,03	129.379.400	67.418.800	52
4.2.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	60	16.595.000	7.691.000	46
4.2.2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	65	65	62	11.721.400	1.896.500	16
4.2.3	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20	20	100	13.155.000	13.155.000	100
4.2.4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	160	141	88	87.908.000	44.676.300	51
4.3	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	128.330.800	63.449.600	49
4.3.1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	100	25.176.000	25.176.000	100
4.3.2	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	100	54.904.100	7.182.000	13



4.3.3	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	100	20.583.100	13.000.000	<b>63</b>
4.3.4	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	100	27.667.600	18.091.600	<b>65</b>
4.4	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>279.360.800</b>	<b>260.792.235</b>	<b>93</b>
4.4.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	219	219	100	2.215.000	1.925.000	<b>87</b>
4.4.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	100	33.500.000	32.925.435	<b>98</b>
4.4.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15	100	6.026.000	6.026.000	<b>100</b>
4.4.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	48	100	237.619.800	219.915.800	<b>93</b>
4.5	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>61.478.500</b>	<b>45.900.500</b>	<b>75</b>
4.5.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	100	17.737.000	14.674.000	<b>83</b>
4.5.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	100	21.450.000	17.900.000	<b>83</b>
4.5.3	Jumlah Mebel Yang Dipelihara (Unit)	2	2	100	1.050.000	0	<b>0</b>
4.5.3	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	100	3.684.000	1.842.000	<b>50</b>
4.5.4	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	100	17.557.500	11.484.500	<b>65</b>
					<b>2.886.165.000</b>	<b>2.553.647.963</b>	<b>88</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

#### *Simpulan Umum atas Capaian Kinerja*

NO	Indikator Kinerja	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,32	Tinggi
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	Sangat Tinggi
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	73 %	Sedang
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %	Sangat Tinggi
5.	Predikat nilai sakisip (2022)	51,60	Rendah

### 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.



3. Melakukan perbaikan atas reviu oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang



Watang Sidenreng, 15 Januari 2024  
CAMAT WATANG SIDENRENG

**ARNOL BARAMULI, ST, M, Adm. KP.**

Pangkat : Pembina

NIP. 197302082008021001



# LAMPIRAN



**LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK/KEUANGAN ANGGARAN TAHUN 2023  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG  
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA DANA APBD TAHUN 2023  
KEADAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPPA (Rp.)	TARGET SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			REALISASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			KE T.
		FISI K	KEUANGAN		FISI K	KEUANGAN		
		(%)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)	(%)	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>2.423.394.500</b>	<b>100</b>	<b>2.423.394.500</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>2.228.261.363</b>	<b>92</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.824.845.000</b>	<b>100</b>	<b>1.824.845.000</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>1.790.700.228</b>	<b>98</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.824.845.000	100	1.824.845.000	100	98	1.790.700.228	98	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>129.379.400</b>	<b>100</b>	<b>129.379.400</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>67.418.800</b>	<b>52</b>	
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penereangan Bangunan Kantor	16.595.000	100	16.595.000	100	46	7.691.000	46	
Penyedia peralatan Rumah tangga	11.721.400	100	11.721.400	100	16	1.896.500	16	
Fasilitas Kunjungan Tamu	13.155.000	100	13.155.000	100	100	13.155.000	100	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.908.000	100	87.908.000	100	51	44.676.300	<b>51</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0					0	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>128.330.800</b>	<b>100</b>	<b>128.330.800</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>63.449.600</b>	<b>49</b>
Pengadaan Mebel	25.176.000	<b>100</b>	<b>25.176.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25.176.000</b>	<b>100</b>
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	54.904.100	100	<b>54.904.100</b>	100	33	7.182.000	<b>13</b>
Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.583.100	100	<b>20.583.100</b>	100	67	13.000.000	<b>63</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.667.600	100	<b>27.667.600</b>	100	75	18.091.600	<b>65</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>279.360.800</b>	<b>100</b>	<b>279.360.800</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>260.792.235</b>	<b>93</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.215.000	100	2.215.000	100	87	1.925.000	<b>87</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.500.000	100	33.500.000	100	98	32.925.435	<b>98</b>
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.026.000	100	6.026.000	100	100	6.026.000	<b>100</b>



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.619.800	100	237.619.800	100	93	219.915.800	<b>93</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>61.478.500</b>	<b>100</b>	<b>61.478.500</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>45.900.500</b>	<b>75</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.737.000	100	17.737.000	100	83	14.674.000	<b>83</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	21.450.000	100	21.450.000	100	83	17.900.000	<b>83</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.734.000	100	4.734.000	100	39	1.842.000	<b>39</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	17.557.500	100	17.557.500	100	100	11.484.500	<b>65</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>51.390.100</b>	<b>100</b>	<b>51.390.100</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>38.250.000</b>	<b>74</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	51.390.100	100	51.390.100	100	74	38.250.000	<b>74</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	1.390.100	100	1.390.100	100	0	0	<b>0</b>

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	50.000.000	100	50.000.000	100	77	38.250.000	<b>77</b>	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	409.200.200	100	409.200.200	100	70	287.136.600	<b>70</b>	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.790.100	100	3.790.100	100	71	2.700.000	<b>71</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2.700.000	100	2.700.000	100	100	2.700.000	<b>100</b>	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	1.090.100	100	1.090.100	100	50	0	<b>0</b>	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>405.410.100</b>	<b>100</b>	<b>405.410.100</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>284.436.600</b>	<b>70</b>	
Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	180.900.000	<b>100</b>	180.900.000	<b>100</b>	<b>100</b>	180.876.600	<b>100</b>	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	223.320.000	98	223.320.000	98	46	103.560.000	<b>46</b>	
Evaluasi Kelurahan	1.190.100	100	1.190.100	100	0	0	<b>0</b>	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	2.180.200	100	2.180.200	100	0	0	<b>0</b>	0



Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	2.180.200	100	2.180.200	100	0	0	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Dana Aset	1.090.100	100	1.090.100	100	0	0	0	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.090.100	100	1.090.100	100	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>2.886.165.000</b>		<b>2.886.165.000</b>			<b>2.553.647.963</b>	<b>88</b>	

Sumber Data : Laporan Realisasai Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2023



Watang Sidenreng, 15 Januari 2024  
CAMAT WATANG SIDENRENG

**ARNOL BARAMULI, ST,M.Adm.KP**

Pangkat : Pembina

NIP. 19730208 200802 1 001

**NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SETIAP KECAMATAN TAHUN 2021**

NO.	UNIT LAYANAN	IMPORTANT DAN PERFORMANCE			NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
		RATA-RATA PELAYANAN	RATA HARAPAN	NILAI GAP			
1.	KECAMATAN BARANTI	3,37	3,94	0,57	84,14	B	BAIK
2.	KECAMATAN TELLU LIMPOE	3,32	3,69	0,38	82,97	B	BAIK
3.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,31	3,52	0,21	82,70	B	BAIK
4.	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3,28	3,89	0,61	81,99	B	BAIK
5.	KECAMATAN PITU RIASE	3,27	3,89	0,62	81,71	B	BAIK
6.	KECAMATAN DUA PITUE	3,24	3,46	0,21	81,09	B	BAIK
7.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,24	3,39	0,15	81,03	B	BAIK
8.	KECAMATAN PITU RIAWA	3,24	3,89	0,65	80,94	B	BAIK
9.	KECAMATAN WATANG PULU	3,23	3,39	0,16	80,75	B	BAIK
10.	KECAMATAN MARITENGGAE	3,20	3,50	0,30	79,92	B	BAIK



11.	KECAMATAN PANCA RIJANG	3,19	3,55	0,36	79,64	B	BAIK
<b>RATA-RATA</b>		<b>3,26</b>	<b>3,65</b>	<b>0,38</b>	<b>81,54</b>	<b>BAIK</b>	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
ATAS PELAYANAN KECAMATAN  
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2023**

NO.	UNSUR PELAYANAN	INFORTANCE DAN PERFORMANCE			ATRIBUSI KEPUASAN	
		Nilai Rata-Rata Pelayanan	Nilai Rata-Rata Harapan	Nilai GAP	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	B	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	B	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	B	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	A	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	B	Baik

6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	B	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	B	Baik
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	B	Baik
<b>Rata-Rata</b>		<b>3.277</b>	<b>3.232</b>	<b>0.730</b>	<b>Baik</b>	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022



**PREDIKAT NILAI SAKIP  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN YANG DINILAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>
A.	Perencanaan Kinerja	30 %	14,40 %
B.	Pengukuran Kinerja	30 %	15,30 %
C.	Pelaporan Kinerja	15 %	6,90 %
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	15,00 %
<b>Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100 %</b>	<b>51,60 %</b>
			<b>CC</b>
<b>Interprestasi</b>			<b>Memadai</b>

Sumber Data : Hasil Reviu Sakip Tahun 2022 oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2023

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG  
TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>MASYARAKAT YANG DIUNDANG</b>	<b>MASYARAKAT YANG HADIR</b>	<b>TINGKAT PARTISIPASI</b>
1.	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023	80 Orang	72 Orang	90 %
2.	Pelaksanaan Tudang Sipulung tingkat Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023	65 Orang	53 Orang	81,5 %
<b>Jumlah</b>		<b>145 Orang</b>	<b>125 Orang</b>	<b>86,2 %</b>

Sumber Data : Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022



Watang Sidenreng, 15 Januari 2023  
CAMAT WATANG SIDENRENG

**H.ARNOL BARAMULI ST,M.Adm.KP**

Pangkat : Pembina

NIP. 197302082008021001



**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SASARAN STRATEGIS  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG  
TAHUN 2023**

NO	TUJUAN	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja				Anggaran			
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	%
	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,32	81,03	B		2.886.165.000	2.553.647.963	88
1		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persentase	100	100	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.390.100	38.250.000	74
2		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	Persentase	73	86	116	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	409.200.200	287.136.600	70
3		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	Persentase	100	100	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.180.200	0	0
4		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat nilai sakip (2021)	Nilai	48,7 (C)	51,6 (C)	CC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.423.394.500	2.228.261.363	92